

Kinerja Dinas Kesehatan dalam Menekan Angka *Stunting* di Kabupaten Bangli

Dev Nandini. BG¹⁾, Putu Eka Purnamaningsih²⁾, Putu Nomy Yasintha³⁾

^{1,2,3)}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: Devnandini00@gmail.com¹⁾, ekapurnama@unud.ac.id²⁾, putu_nomy@unud.ac.id³⁾

ABSTRACT

Bangli Regency has high stunting cases in Bali Province, based from RISKESDAS (National Basic Health Research) 2018, Bangli Regency was declared to have a stunting prevalence of 43.2%. In its efforts to deal with it, the Bali Provincial Government has set Bangli Regency as the locus of stunting reduction in Bali in 2020. Therefore, the Bangli Regency Government through the Office of Bangli Public Health continue to improving their performance in reducing stunting rates in Bangli. The purpose of this study is to find out about the performance of the Office of Bangli Public Health in reducing stunting rates in Bangli Regency according to the Ministerial Regulation of health of the Republic Indonesia number 29 of 2019. The indicator that we used to define the Performance of the Office of Bangli Public Health Service in reducing stunting in Bangli is the performance measurement of Dwiyanto (2006) there are Productivity, Service Quality, Responsiveness, Responsibility and Accountability. The research method used in this research is descriptive qualitative, data were collected by observation, interviews, and documentation studies. The results showed that the performance of the Office of Bangli Public Health in suppressing the stunting rate in Bangli was still not fully optimal. There are still deficiencies that cause the stunting reduction efforts is hampered, such as the lack of nutrition workers, budget limitation, the lack of additional food for stunting children and the lack of socialization regarding the function of iron tablets for young women in Bangli Regency.

Keywords: Performance, Suppressing, Stunting

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan suatu bentuk upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah sebagai peningkatan aspek-aspek dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang berlaku sebagai suatu proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara dengan tujuan sebagai perwujudan dari tujuan nasional.

Kesehatan masyarakat menjadi poin penting dalam meningkatkan angka pembangunan nasional di suatu negara, karena dengan terjaminnya masyarakat yang sehat maka segala bentuk kegiatan ekonomi dapat terjadi, hal ini

tentunya dapat meningkatkan produktifitas masyarakat. Maka dari itu, *Gross National Product* (GNP) atau pendapatan perkapita disuatu negara dapat meningkat, dengan begini maka pembangunan ekonomi juga terjadi. Dapat kita lihat disini bagaimana faktor kesehatan di suatu negara sangat mempengaruhi indikator pembangunan lain seperti ekonomi di suatu negara.

Isu kesehatan yang saat ini sedang menjadi fokus masyarakat dunia adalah permasalahan *stunting*, Balita *stunting* termasuk dalam masalah gizi kronis

yang penyebabnya dikarenakan oleh berbagai macam faktor seperti kondisi gizi ibu pada masa kehamilan, kondisi sosial dan ekonomi keluarga, kondisi sakit serta asupan gizi yang kurang pada bayi. Balita *stunting* dapat mengalami permasalahan dalam tahap perkembangan fisik serta kognitif di masa depan (Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan Situasi Balita Pendek (*Stunting*) di Indonesia Kemenkes RI 2018). Dengan terhambatnya perkembangan fisik serta kognitif anak, hal ini tentunya akan menurunkan kualitas manusia di suatu negara.

Jumlah balita yang mengalami *stunting* di dunia menurut data WHO pada tahun 2017 terjadi sebanyak 22,2% atau sekitar 150,8 juta balita dunia mengalami masalah *stunting*. Dalam data WHO, disebutkan bahwa dari seluruh balita yang mengalami *stunting*, sebesar 55% nya berasal dari Asia. Menurut data WHO prevalensi balita *stunting* di Indonesia rata-rata prevalensi balita *stunting* di Indonesia tahun 2005-2017 sebesar 36,4%. Angka ini tentu cukup besar mengingat batas maksimal yang ditetapkan oleh WHO adalah sebesar 20% atau seperlima dari total jumlah balita di suatu negara. Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2018 prevalensi *stunting* balita di Indonesia masih berada di angka 30,86% dan provinsi Bali dengan angka prevalensi sebesar 21,9% yang berarti angka prevalensi tersebut sudah melebihi batas maksimal dari angka prevalensi *stunting* yang ditetapkan oleh WHO.

Bangli sebagai salah satu Kabupaten di Bali mendapatkan angka prevalensi *stunting* yang tinggi di Provinsi Bali, Tingginya angka *stunting* di

Kabupaten Bangli mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam penanganannya, dimana sehingga pada tahun 2020 Kabupaten Bangli ditetapkan sebagai lokus penurunan angka *stunting* di Provinsi Bali. Terdapat 13 desa di Kabupaten Bangli yang perlu mendapatkan perhatian khusus karena jumlah prevalensi balita *stunting* yang tinggi bahkan ada yang masuk zona kuning (prevalensi>30%) yaitu Desa Mengani dan Desa Ulian di Kecamatan Kintamani. Sedangkan 11 desa lainnya masuk kedalam zona ringan yakni angka prevalensi di antara 20-30%. Penyebab permasalahan kesehatan *stunting* pada balita tentunya dipengaruhi oleh banyak hal, tidak hanya pada saat di dalam kandungan ibu tetapi *stunting* pada balita juga dipengaruhi oleh kondisi eksternal balita, Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia telah mengelompokkan beberapa faktor yang mempengaruhi kejadian *stunting* di masyarakat yaitu layanan Ante Natal Care (ANC) dan Post Natal Care (PNC), praktek pengasuhan, akses keluarga ke makanan bergizi dan air bersih serta kesadaran terhadap sanitasi (TNP2K, 2017).

Permasalahan balita *stunting* di Kabupaten Bangli sejatinya sudah menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Bangli khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli yang memiliki tugas dalam menangani angka *stunting* yang telah ditugaskan dalam Peraturan Bupati Bangli Nomor 22 tahun 2020 mengenai Penurunan *Stunting* Dalam payung hukum ini mengatur mengenai pilar-pilar penurunan *stunting* di Kabupaten Bangli, ruang lingkup serta sasarannya, bagaimana edukasi dan pelatihan serta penyuluhan gizi pada masyarakat, lalu bagaimana pencatatan serta pelaporannya.

Namun, dalam praktiknya usaha- usaha yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli mengalami hambatan, seperti kendala dalam kerjasama lintas sektoral yaitu beberapa puskesmas dan puskesmas pembantu kurang beroperasi secara optimal (bali.tribunnews.com 2018) padahal hal ini merupakan tanggung jawab bersama diantara Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli sebagai Dinas yang bertanggung jawab atas permasalahan gizi di Kabupaten Bangli serta Puskesmas sebagai pihak yang menjalankan Posyandu sebagai media penyuluhan gizi masyarakat seperti yang dimuat dalam pasal 14 ayat 3 Peraturan Bupati Bangli Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penurunan *Stunting* dan juga adanya kekurangan Sumber Daya Manusia sebagai tenaga gizi profesional padahal sudah diatur dalam Ketentuan Umum PERBUP Bangli No. 22 Th. 2020, selain itu terdapat permasalahan kurangnya sumber dana dalam menjalankan program pengentasan *stunting* serta tidak adanya ketersediaan dana dalam menunjang Pemberian Makanan Tambahan (yang selanjutnya disebut PMT) pada balita sehat padahal permasalahan *stunting* tidak hanya diobati tetapi juga harus dicegah,

Peran pemerintah khususnya dinas sebagai pihak yang secara langsung terlibat tentunya sangat diperlukan dalam menangani permasalahan *stunting* di Kabupaten Bangli selain itu prevalensi *stunting* di Kabupaten Bangli harus menjadi tanggung jawab bersama termasuk masyarakat Bangli. Berangkat dari masalah tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kinerja Dinas Kesehatan dalam Menekan Angka *Stunting* di Kabupaten Bangli”.

2. LANDASAN TEORI

Teori Kinerja

Kinerja merupakan sebuah hasil atau penentu derajat keberhasilan dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai bentuk ketercapaian tujuan tertentu dalam organisasi selama jangka waktu tertentu. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh Suntoro dalam Tika (2006) yang menyebutkan bahwa kinerja merupakan hasil kerja yang dilakukan oleh sekelompok orang atau individu pada suatu organisasi sesuai dengan wewenang serta tanggung jawab organisasi yang dilakukan sebagai rangka pencapaian tujuan organisasi bersangkutan dengan pelaksanaan secara legal dan sah yang tidak melanggar hukum moral dan etika. Dalam pernyataan yang dikemukakan menurut Aguyus Dwiyanto (2006), ada 5 indikator penentu nilai derajat keberhasilan dalam kinerja organisasi, di antaranya adalah produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas.

LANDASAN KONSEPTUAL

Stunting

Stunting merupakan suatu keadaan dimana kondisi tinggi badan anak yang kurang dari normal berdasarkan usia dan jenis kelamin. Adanya kondisi *stunting* mengindikasikan status gizi yang kurang (malnutrisi) dalam jangka waktu yang lama atau kronis (aryu candra, 2020). Kekurangan gizi pada bayi terjadi sejak bayi berada di dalam kandungan dan pada masa awal (setelah bayi lahir). Namun, kondisi ini baru terlihat setelah bayi berusia 2 tahun. Kekurangan gizi yang terjadi pada masa tersebut mengakibatkan perkembangan dan

perumbuhan anak menjadi terhambat/ kurang optimal dan sulit untuk diperbaiki.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dibuat menggunakan metode pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Data yang dipakai dalam penelitian ini bersumber pada dua macam sumber, yaitu data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini teknik purposive sampling digunakan sebagai penentu informan yang akan dipilih. Peneliti dalam penelitian ini mengumpulkan data-data menggunakan teknik observasi, wawancara serta dokumentasi. Serta penggunaan *Analysis Interactive Models* berdasarkan sumber Miles Huberman dalam Sugiyono (2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Indikator Produktivitas

Pada penelitian ini produktivitas dapat dilihat dari rasio input dan output, dimana inputnya yaitu sumber daya manusia (SDM) dan anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli untuk permasalahan *stunting* serta outputnya yaitu efektivitas dan efisiensi pencegahan kasus melalui jumlah kasus yang terjadi

- Input dalam penelitian ini adalah sumber daya manusia (SDM) sebagai petugas gizi yang menangani langsung kasus di Kabupaten Bangli berjumlah 17 orang, dengan status 6 orang PNS, 10 orang pegawai kontrak dan 1 orang tenaga pengabdian. Terdapat 12 Puskesmas di 4 Kecamatan di Kabupaten Bangli, sampai saat ini untuk Puskesmas Kintamani II tidak memiliki tenaga gizi. Lalu dalam

pelaksanaan posyandu dibantu oleh bidan desa. Hal ini dapat dilihat sebagai kurang optimalnya input dari Dinas Kesehatan dalam menangani *stunting* Di Kabupaten Bangli. Dalam input anggaran sendiri baru dianggarkan secara spesifik untuk program penurunan *stunting* pada tahun 2020, sebelum tahun itu (2016-2019) dianggarkan dalam bentuk anggaran program perbaikan gizi masyarakat. Dalam hal penganggaran juga menunjukkan kurang optimalnya input Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli dalam menangani kasus *stunting* di Kabupaten secara khusus.

- Sedangkan output nya adalah efektivitas dan efisiensi yang ditinjau berdasarkan jumlah kasus yang terjadi dimana dalam 5 tahun (2016-2020) tidak terjadi penurunan kasus melainkan jumlah kasus yang tidak dapat diprediksi yaitu naik turun, serta di beberapa daerah di Kabupaten Bangli seperti Desa Ulian dan Desa Mengani memiliki prevalensi *stunting* yang tinggi/ >30% sedangkan di 11 desa lain sebesar >20-30% (prevalensi *stunting* maksimal 20% tiap daerah oleh WHO). Dengan demikian hal ini menunjukkan output kerja yang kurang optimal.

2. Indikator Kualitas Layanan

Kualitas Layanan pada penelitian ini ditinjau berdasarkan sejauh mana instansi ini dapat menangani *stunting* dengan maksimal yaitu dari segi pencegahan maupun pengobatannya.

- Dalam upaya pencegahan sudah dilaksanakan sosialisasi pada masyarakat bersamaan dengan pelaksanaan posyandu (satu bulan sekali) di desa-desa, Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli sudah pernah memberikan penyuluhan lewat radio dan pemasangan baliho. Untuk sosialisasi khusus *stunting* pernah dilaksanakan sebelum pandemi, untuk 2020 sampai saat ini belum ada sosialisasi khusus mengingat dinas belum berani mengumpulkan masyarakat berskala besar di desa-desa. Dalam upaya pencegahan juga diberikan Tablet Tambah Darah (TTD) pada remaja putri (SMA/SMP) di Kabupaten Bangli yang harus diminum 1 minggu sekali, namun tidak pernah ada sosialisasi mengenai manfaat TTD kepada siswa. Kurangnya sosialisasi ini menurunkan minat siswa dalam mengonsumsi TTD, sehingga dalam pelaksanaannya menjadi kurang optimal.
- Dalam upaya penanganan kasus *stunting* sudah diberikan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada anak kurang gizi, bumil KEK, dan pemberian vitamin A 6bulan sekali namun keberadaan PMT masih terbatas, dan hal ini menjadi keluhan dari orang tua dengan anak *stunting* yang menginginkan adanya makanan tambahan seperti vitamin dan obat penambah nafsu makan. Lalu dalam mendorong gizi seimbang untuk penyembuhan sudah dilaksanakan pelatihan mengenai menu MPASI pada saat pelaksanaan posyandu. Untuk setiap

kasus *stunting* yang terjadi, setiap anak sudah didampingi oleh bidan desa.

3. Indikator Responsivitas

Responsivitas dalam penelitian ini dilihat dari kemampuan organisasi untuk memenuhi dan mengenali kebutuhan masyarakat, yang dibahas melalui alur pelaporan kasus dan respon Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli dengan adanya pelaporan kasus baru.

- Saat pelaksanaan posyandu bila ditemukan kasus tinggi balita yang tidak sesuai dengan tabel atau dibawah kurva maka bidan desa akan melapor pada petugas gizi agar dilaksanakan pengukuran ulang, lalu bila memang benar balita tersebut dicurigai menderita *stunting* maka akan dirujuk ke puskesmas terdekat untuk ditangani langsung oleh dokter dengan pemeriksaan, konsultasi dan pengobatan. Lalu setelah status *stunting* telah diputuskan secara bersama-sama oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas, maka nanti Dinas Kesehatan akan melapor pada Kepala Desa, Kelian Banjar dan petugas posyandu untuk melaksanakan pendampingan bersama terhadap anak *stunting*. Hal ini menunjukkan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli sudah secara optimal dalam menyusun alur pelaporan kasus serta penanganan kasus yang ada.

4. Indikator Responsibilitas

Responsibilitas dalam penelitian ini dilihat dari pelaksanaan program-program penurunan *stunting*

yang sesuai dengan mekanisme serta prosedur yang berlaku, serta koordinasi antar instansi terkait intervensi sensitif dan spesifik pada penanganan *stunting*:

- Untuk pelaksanaan program penurunan *stunting* sudah sesuai SOP, dengan meneruskan arahan dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali untuk data-data anak sudah tersedia di aplikasi e-PPBGM
- Kehadiran balita menjadi salah satu permasalahan mengingat adanya pandemi dan kesibukan orang tua balita yang tidak bisa menghadiri posyandu sehingga dalam penjangkauan data balita menjadi kurang optimal
- Kerjasama lintas sektor terganggu akibat dinas-dinas terkait kurang memahami tugas dan fungsinya dalam penanganan *stunting* serta adanya mutasi pegawai-pegawai dengan demikian akan memakan waktu dalam menjalin hubungan antar instansi

Pada indikator responsibilitas, Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli sudah dapat bekerja secara optimal dengan mengikuti prinsip-prinsip birokrasi, namun masalah yang muncul berasal dari luas Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli.

5. Indikator Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam penelitian ini dilihat dari adanya laporan pertanggung jawaban yang dibuat untuk melihat capaian target dari program yang telah dilaksanakan, serta laporan pertanggung jawaban yang dilakukan koordinasi secara lebih

lanjut melalui jejaring instansi-instansi sebagai berikut:

- Akuntabilitas internal dilaksanakan dengan penyelenggaraan rapat-rapat rutin untuk membahas capaian kerja dan evaluasi kerja. Dimana sumber laporan berasal dari puskesmas-puskesmas yang ada di Kabupaten Bangli
- Akuntabilitas eksternal dilaksanakan dengan mengikuti rapat rutin instansi untuk membahas intervensi *stunting* setiap tahun, namun belum terdapat akses untuk masyarakat dalam mengetahui jumlah kasus *stunting* (up to date) di Kabupaten Bangli. Kurangnya akses informasi untuk masyarakat ini menjadi sedikit permasalahan dalam akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian terkait Kinerja Dinas Kesehatan dalam menekan angka *stunting* di Kabupaten Bangli sudah berjalan dengan cukup baik, namun masih belum optimal dikarenakan dari 5 indikator kinerja, hanya 3 indikator yang sudah berjalan dengan baik yaitu responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas. Sedangkan 2 indikator lainnya yaitu produktivitas dan kualitas layanan yang diberikan ternyata belum cukup optimal.

6. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Candra, Aryu. (2020). EPIDEMIOLOGI *STUNTING*. Semarang Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro

- Dwiyanto, Agus. (2017). *Reformasi Birokrasi Publik* Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Helmyanti, Siti. (2019). *STUNTING Permasalahan dan Penanganannya*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Kementerian Kesehatan Republik *Indonesia*. (2011). *Pedoman Umum Pengelolaan Posyandu*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional. (2018). **PEDOMAN PELAKSANAAN INTERVENSI PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI DI KABUPATEN/ KOTA**. Jakarta: Kementerian PPN
- Mahsun, Mohamad. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE
- Picauly, Intje. (2020). *STUNTING Cegah Gagal Tumbuh Sejak Dini Agar Anak Sehat dan Cerdas*. Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari
- Pusat Data dan Informasi, Kementerian Kesehatan RI. (2018). *Situasi Balita Pendek (Stunting) di Indonesia*. Jakarta: Pusat Data dan Informasi, Kementerian Kesehatan RI
- Rahayu, Atikah. (2018). *STUDY GUIDE-STUNTING DAN UPAYA PENCEGAHANNYA BAGI MAHASISWA KESEHATAN MASYARAKAT*. Yogyakarta: CV Mine.
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). (2017). *100 Kabupaten/ Kota Prioritas untuk Intervensi Anak Kerdil (Stunting)* Jakarta: Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia
- Trihono. (2015). *PENDEK (STUNTING) DI INDONESIA, MASALAH DAN SOLUSINYA*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak

Peraturan Bupati Bangli Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penurunan *Stunting*

JURNAL DAN SUMBER ONLINE

Nomy, Yasintha Putu. (2021). *Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Sebagai Model Partisipasi Publik Dalam Keterbukaan Informasi di Tingkat Desa di Bali*. JIPKA, Vol. 1, No.12021. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JIPKA/article/view/51193/75676591681>
Diakses